



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

LAPORAN KINERJA BALMON SFR KELAS II BANDA ACEH TAHUN 2019



BALMON SFR KELAS II BANDA ACEH
JL. P. NYAK MAKAM NO. 33, BANDA ACEH - 23117, INDONESIA
TELP. 0651 - 34433
FAX. 0651 - 638538
EMAIL : upt_aceh@postel.go.id



SDPPI
Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio
Kelas II Banda Aceh



LAPORAN KINERJA BALMON KELAS II BANDA ACEH

SDPPI

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio
Kelas II Banda Aceh

RINGKASAN EKSEKUTIF

Peran utama Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh adalah pelayanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio serta penanganan gangguan frekuensi radio guna mendukung ketersediaan layanan telekomunikasi berkualitas yang dapat dinikmati oleh rakyat banyak serta dapat memberikan manfaat ekonomis untuk masyarakat. Penilaian capaian Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh dapat dilihat dari capaian sejumlah indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2019. Capaian indikator kinerja dimaksud terdapat dalam table dibawah ini:

No	Sasaran Kegiatan (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Capaian (4)	Persentase (5)*
1.	Meningkatnya layanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio	1. Persentase (%) kabupaten/kota yang dapat dimonitor	80%	82,61%	103,26%
		2. Persentase (%) stasiun radio penyiaran (radio dan TV) yang terukur sesuai dengan ISR	35%	78,15%	223,29%
		3. Persentase (%) jumlah aduan/klaim yang diselesaikan	95%	100%	105,26%
		4. Persentase (%) kepatuhan penggunaan frekuensi radio di wilayah UPT	80%	89,04%	111,3%
		5. Persentase (%) kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR	85%	80,25%	94,41%
		6. Persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT	85 %	96.33 %	113.3 %
		7. Persentase (%) terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT	100%	100%	100%
		8. Persentase (%) terlaksananya UNAR	100%	100%	100%
2.	Terwujudnya tata kelola UPT Monspekfrekrad yang bersih, efisien dan efektif	1. Persentase (%) pelaksanaan koordinasi/ pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio	100%	100%	100%
		2. Persentase (%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100%	100%	100%

*Note : (5) didapat dari nilai (4) dibagi (3)

Ringkasan pencapaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh dibawah ini. Adapun penjelasan secara lengkap diuraikan lebih jauh pada Bab III.

Pada Sasaran Program I “Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio” terdapat 8 Indikator Kinerja, berikut ringkasan pencapaian masing-masing indikator.

Persentase (%) Kabupaten/Kota yang dapat Dimonitor.

Pada tahun 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh merencanakan pelaksanaan monitoring spektrum frekuensi radio sebanyak 10 kali di 19 dari 23 wilayah kota/kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Realisasi pelaksanaan monitoring spektrum frekuensi radio sebanyak 12 kali di 19 kota/kabupaten Provinsi Aceh dan telah termonitor okupansi pendudukan 22 subservice. Dengan demikian indikator kinerja persentasi (%) kabupaten/kota yang dapat dimonitor melebihi target yaitu sebesar 82,61 %.

Persentase (%) Stasiun Radio Penyiaran (radio dan TV) yang Terukur sesuai dengan Data ISR.

Pada tahun 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh merencanakan pelaksanaan pengukuran parameter teknis frekuensi radio (radio dan TV siaran) di wilayah Provinsi Aceh sebanyak 9 kali, dengan target 35 % stasiun yang diukur sesuai dengan ISR. Realisasi pelaksanaan pengukuran parameter teknis frekuensi radio sebanyak 13 kali kegiatan dan dari 119 stasiun yang ber-ISR, 93 stasiun sesuai dengan ISR. Dengan demikian realisasi jumlah stasiun yang hasil pengukuran sesuai dengan ISR telah melebihi target yaitu sebesar 78,15 %.

Persentase (%) Jumlah Aduan/Klaim yang Diselesaikan.

Pada tahun 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh merencanakan 2 kali kegiatan penanganan gangguan frekuensi radio di wilayah Provinsi Aceh dengan target pada perjanjian kinerja 95 % aduan/klaim yang dapat diselesaikan. Realisasi kegiatan penanganan gangguan frekuensi radio di wilayah Provinsi Aceh sebanyak 3 kali kegiatan yaitu penanganan gangguan frekuensi Radar Cuaca BMKG Banda Aceh, gangguan MW Link PT. Smartfren Telecom tbk dan gangguan dari Wireless Access Point (WAP) 5,8 GHz di Kab. Bireuen dan Kota Lhokseumawe. Semua aduan gangguan tersebut telah diselesaikan dengan baik (clear). Dengan demikian target penyelesaian aduan / klaim gangguan frekuensi radio mencapai 100 %.

Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah Kerja UPT

Tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh telah menanda tangani perjanjian kinerja, salah satunya 80 % kepatuhan penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah kerja UPT, sementara pada program kerja tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh merencanakan pelaksanaan penertiban penggunaan frekuensi radio sebanyak 2 kali dan tindak lanjut hasil penertiban 2 kali di wilayah Provinsi Aceh. Dengan target kinerja dan rencana kerja tahun 2019 tersebut maka Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh telah merealisasikan kegiatan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio sebanyak 3 kali dan tindak lanjut hasil penertiban sebanyak 3 kali. Target operasi (TO) penertiban sejumlah 31 pengguna, jumlah perangkat radio yang telah disita/segel adalah 106 perangkat dan diberi peringatan kepada 1 pengguna. Sedangkan tindak lanjut hasil penertiban telah dilaksanakan dengan selesainya dilakukan pengurusan ISR oleh klien, dengan demikian capaian kinerja kepatuhan penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh telah mencapai 89,04 %.

Persentase (%) Kesesuaian Data Hasil Inspeksi dengan Data ISR

Pada daftar perjanjian kinerja tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh menargetkan 85 % kesesuaian data hasil inspeksi, dengan 1669 data sample ISR yang ditetapkan oleh Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI, sedangkan pada daftar rencana program kerja 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh merencanakan kegiatan inspeksi dalam rangka validasi data ISR sebanyak 7 kali kegiatan di wilayah Provinsi Aceh. Sampai dengan Desember 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh telah melaksanakan inspeksi dalam rangka validasi data ISR sebanyak 10 kali dengan data yang diperoleh yaitu 1609 link yang terdiri dari 1487 legal, 86 diduga illegal, 1015 sesuai ISR dan 236 tidak sesuai ISR serta 236 link telah off air. Selain inspeksi dalam rangka validasi data terhadap stasiun link, juga dilakukan inspeksi dan validasi data terhadap stasiun radio konsesi dan dinas siaran dengan data yang diperoleh yaitu 60 stasiun, yang terdiri dari : 60 legal, 33 sesuai ISR dan 22 tidak sesuai ISR serta 5 stasiun telah off air. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator persentase (%) kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR sebesar 80,25 % yaitu dari 1306 stasiun yang dilakukan validasi, 1048 stasiun telah sesuai ISR. Kepada pengguna yang tidak sesuai ISR dan illegal, telah diberi surat peringatan atau sita/segel perangkat.

Persentase (%) Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur UPT.

Pada tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh menargetkan 85 % berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT bertujuan untuk memastikan kondisi perangkat SMFR dan alat pendukung monitoring/ukur tetap kondisi baik dan terawat.

Selain perawatan rutin perangkat pendukung SMFR dan alat pendukung monitoring/ukur Balai Monitor Kelas II Banda Aceh juga melakukan inspeksi rutin perangkat SMFR transportable di empat lokasi yaitu di Kota Sabang, Kab. Aceh Besar, Nagan Raya dan Aceh Tenggara. Dengan demikian indikator kinerja persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur UPT tercapai melebihi target yaitu sebesar 96,33 %.

Persentase (%) Terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT

Dalam perjanjian kinerja tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh juga menargetkan 100% terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT, kegiatan ini bertujuan untuk mendukung meningkatnya pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Sampai dengan posisi Desember 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh telah melaksanakan pendistribusian SPP dan ST di wilayah Provinsi Aceh sebanyak 547 SPP BHP frekuensi radio sedangkan untuk ISR sejak awal 2019 tidak lagi didistribusikan oleh UPT melainkan dicetak secara mandiri melalui E-licensing sebagaimana arahan Ditjen SDPPI. Terdapat 66 ST1,ST2,ST3 dan STT namun telah terbayar sampai periode Desember 2019. Dengan demikian capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh telah tercapai 100% dari target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

Persentase (%) Terlaksananya UNAR

Dalam perjanjian kinerja tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh menetapkan target 100% terlaksananya UNAR sementara pada rencana program kerja tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh merencanakan 1 kali kegiatan di wilayah Provinsi Aceh. Sampai dengan Desember 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh telah melaksanakan UNAR sebanyak 1 kali yaitu di Kab. Aceh Timur dengan total peserta 50 orang terdiri dari YD sejumlah 42, YC sejumlah 5 dan YB sejumlah 3 dengan demikian capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh telah tercapai 100% dari yang ditargetkan.

Pada Sasaran Program II “Terwujudnya Tata Kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang Bersih, Efisien dan Efektif” terdapat 2 (dua) indikator kinerja, berikut ringkasan capaian masing-masing indikator.

Pada tahun 2019, dilakukan 2 (dua) kegiatan layanan (yang merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya) pada pelayanan publik Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh. Dua kegiatan layanan tersebut adalah pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio dan layanan administrasi. Hasil dari kegiatan ini digunakan sebagai dasar bagi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh untuk peningkatan pelayanan publik dalam rangka memenuhi salah satu sasaran terwujudnya layanan prima terhadap masyarakat pengguna spektrum frekuensi radio di wilayah Provinsi Aceh.

Persentase (%) Pelaksanaan Koordinasi /Pendampingan Pengurusan Penyelesaian Piutang BHP Frekuensi Radio

Selain melaksanakan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban dan penanganan gangguan frekuensi radio, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh juga melaksanakan koordinasi / pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio di wilayah Provinsi Aceh. Dalam hal pelaksanaan pendampingan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang selaku instansi yang menangani piutang negara.

Pada tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh merencanakan koordinasi /pendampingan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio sebanyak 4 kali dan telah dilaksanakan sesuai perencanaan tersebut dengan demikian maka capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh tercapai 100%. Adapun jumlah tunggakan yang dilimpahkan sebanyak 25 SPP BHP, sampai dengan Desember 2019 telah dibayarkan 7 SPP BHP dan 18 SPP BHP belum terbayar.

Persentase (%) Layanan Administrasi yang Dilaksanakan Sesuai dengan Perencanaan

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh juga melaksanakan layanan administrasi dengan rincian sebagai berikut :

a. Perencanaan

Pada tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh menyusun rencana program kerja tahunan dengan total pagu dalam DIPA Rp. 9.014.036.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp. 4.857.002.000,- dan PNBPN sebesar Rp. 4.157.034.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Keg.	Pagu (Rp)	Target
1	Layanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban pemanfaatan sumber daya pos dan informatika Balai Banda Aceh	Rp. 719.039.000,-	33 Layanan
2	Layanan penyelesaian penanganan gangguan Balmon Banda Aceh	Rp. 26.110.000,-	2 Layanan
3	Dukungan layanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio UPT. Ditjen SDPPI.	Rp. 2.554.732.000,-	1 Layanan
4	Layanan internal (overhead)	Rp. 107.102.000,-	1 Layanan
5	Layanan perkantoran	Rp. 5.607.053.000,-	1 Layanan

b. Ketata Usahaan dan Rumah Tangga

Ketatausahaan

Kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi pengagendaan surat masuk dan surat keluar yang berasal dari lingkungan Kementerian Kominfo, Ditjen SDPPI dan jajaran pemerintah Propinsi Aceh, jajaran pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Aceh serta para penyelenggara/pengguna spektrum frekuensi radio.

- Surat masuk selama periode bulan Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebanyak 585 surat.
- Surat keluar yang diterbitkan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh selama periode bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 sebanyak 890 surat.

Kerumahtanggaan

- Pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan kantor serta peralatan rumah tangga kantor.
- Pengadaan barang dan jasa, dalam rangka menunjang kegiatan operasional maupun administrasi Tahun Anggaran 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh telah melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa sebanyak 5 (lima) kontrak.

c. Kepegawaian

Pada tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh memiliki sumber daya manusia sejumlah 28 pegawai negeri sipil (PNS), 3 calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan 14 pegawai non PNS.

Pegawai negeri sipil terdiri dari : golongan IV sejumlah 4 pegawai, golongan III sejumlah 15 pegawai, golongan II sejumlah 10 pegawai dan golongan I sejumlah 2 pegawai. Pada tahun 2019 terdapat 4 pegawai kenaikan pangkat/golongan dan 11 pegawai kenaikan gaji berkala, sedangkan dari segi pendidikan formal pendidikan S2 sejumlah 6 pegawai, S1 sejumlah 10 pegawai, D3 sejumlah 4 pegawai, SLTA sejumlah 9 pegawai, SLTP sejumlah 1 pegawai dan SD sejumlah 1 pegawai

d. Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh posisi desember 2019 adalah terserap sebesar Rp. 8.710.083.534 dari pagu Rp. 9.014.036.000,- atau sebesar 96,63%

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh melakukan revisi anggaran/DIPA sebanyak 4 (empat) kali yaitu 3 (tiga) kali revisi administrasi/POK berupa pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap dan revisi perubahan antar out put dalam satu kegiatan, 1 (satu) kali revisi pagu minus anggaran dan perubahan halaman III DIPA.

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakaatuh

Allhamdulillahirabbil'amin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, atas segala rahmat dan ridho-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh Tahun 2019, merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah kepada pimpinan. Dokumen ini juga merupakan dokumen penting dalam siklus perencanaan sebagai umpan balik untuk masukan tahun berikutnya, sehingga dapat membantu penyusunan rencana strategik dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja. Dokumen ini merupakan data terpadu antara kinerja dan anggaran yang mendukungnya, antara sasaran dan keluaran yang dicapai, sehingga dapat menjadi instrumen untuk menilai efektifitas dan efisiensi, dan produktifitas instansi.

LKIP ini telah disusun dengan cermat, tepat dan terukur dengan melibatkan Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Seksi Pemantauan dan Penertiban serta Seksi Sarana dan Pelayanan dilingkungan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh.

Melalui LKIP Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh tahun 2019, melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2019, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategik Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika 2015-2019 dan Rencana Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh Tahun 2019.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan masukan seberapa jauh keberhasilan dan capaian kinerja serta kekurangan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2019. Semoga laporan ini bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Banda Aceh, Juni 2020

PLT. KEPALA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
KELAS II BANDA ACEH

M. JAMIL

DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
C. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS	4
D. SISTEMATIKA PELAPORAN.	5
BAB II PERJANJIAN KINERJA	6
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019	6
B. SASARAN PROGRAM.....	6
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	8
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	8
SASARAN 1. <i>MENINGKATNYA LAYANAN MONITORING, PENGUKURAN, INSPEKSI DAN PENERTIBAN PENGUNAAN FREKUENSI RADIO SERTA PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO</i>	9
1. IK-1 Persentase (%) Kabupaten/kota yang dapat dimonitor	9
2. IK-2 Persentase (%) Stasiun radio penyiaran (radio dan TV) yang terukur sesuai dengan data ISR	9
3. IK-3 Persentase (%) Jumlah aduan yang diselesaikan.....	11
4. IK-4 Kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT.....	13
5. IK-5 Kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR	15
6. IK-6 Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur di UPT	16
7. IK-7 Terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT	19
8. IK-8 Terlaksananya UNAR	20
SASARAN 2. <i>TERWUJUDNYA TATA KELOLA UPT MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO YANG BERSIH, EFISIEN DAN EFEKTIF</i>	23
1. IK-1 Persentase (%) Pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio	23
2. IK-2 Ipsentase (%) Layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	24
B. KINERJA LAINNYA	34
1. Iklan Layanan Masyarakat dan Sosialisasi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.....	34

2. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	35
C. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 s.d. 2019.....	36
D. REALISASI ANGGARAN.....	37
BAB IV PENUTUP	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas sama seperti sumber daya alam yang ada di tanah dan juga air, bila tidak dimanfaatkan dengan benar dapat merugikan warga negara. Karena terbatas maka harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara sebagai mana diamanatkan dalam UUD 45 pasal 33 ayat 2 yaitu sumber daya alam terdiri dari tanah, air, udara dan semua yang terkandung di dalamnya harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan seiring perkembangan teknologi informatika spektrum frekuensi radio makin banyak dipergunakan untuk keperluan sehari hari, agar pemanfaatan frekuensi radio tertib, teratur dan efisien (tidak boros) dan untuk mencegah timbulnya gangguan (interferensi), karena propagasi gelombang radio merambat tanpa mengenal batas wilayah/negara, maka pemanfaatan frekuensi radio perlu diatur.

Dalam hal pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio, pemerintah mendelegasikan kepada Direktorat Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga negara yang melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) di daerah mengemban tugas dan fungsi sebagai pelaksana pengawasan dan pengendalian frekuensi di wilayah Provinsi Aceh.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh adalah untuk mengukur kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dikaitkan dengan visi dan misi yang diemban, serta untuk mengetahui dampak positif maupun negatif atas kebijakan yang diambil.

Melalui laporan akuntabilitas dapat diambil langkah-langkah korektif terhadap berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan dan juga untuk memadukan kegiatan-kegiatan utama dalam mencapai sasaran dan tujuan, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana program dan kegiatan di masa yang akan datang.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana diatur dalam Bab I dan Bab II.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang penggunaan frekuensi radio. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program;
- b. Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, dan pemantauan spektrum frekuensi radio;
- c. Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap pengguna spektrum frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika;
- d. pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio;
- e. Penyampaian izin stasiun radio dan surat pemberitahuan pembayaran biaya hak pengguna frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang biaya hak pengguna frekuensi radio;
- f. Pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio
- g. Pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio;
- h. Pelaksanaan ujian amatir radio; dan
- i. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat unit pelaksana teknis bidang monitor spektrum frekuensi radio.

Struktur organisasi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh terdiri dari :

1. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat.

2. Seksi Pemantauan dan Penertiban

Seksi Pemantauan dan Penertiban mempunyai tugas melakukan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan, penertiban, penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika, pengukuran serta validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio.

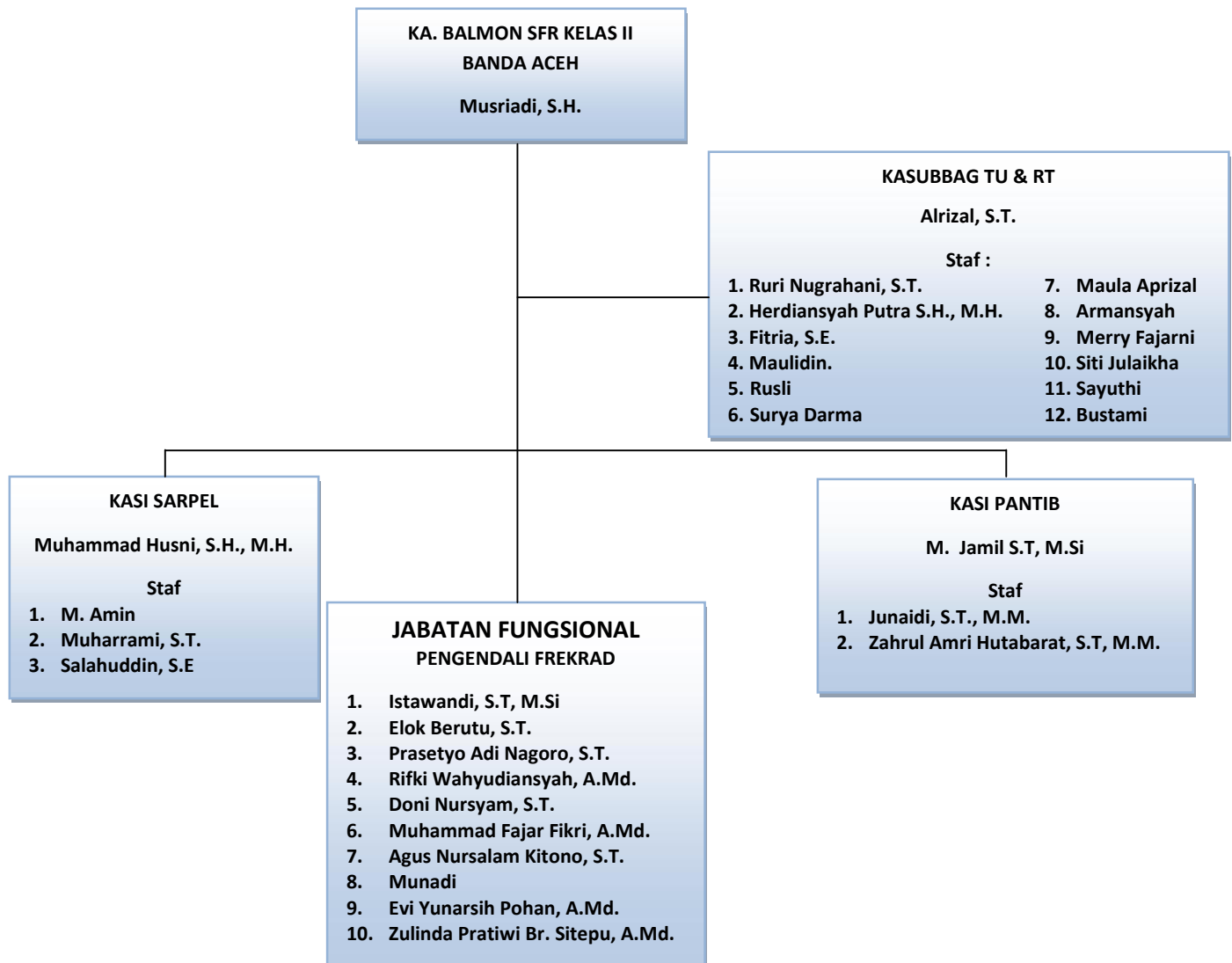
3. Seksi Sarana dan Pelayanan

Seksi Sarana dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyampaian izin stasiun radio dan surat pemberitahuan pembayaran biaya hak pengguna frekuensi, pendampingan penyelesaian piutang biaya hak pengguna frekuensi radio, pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum, pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan perangkat monitor spektrum frekuensi radio, serta pelaksanaan ujian amatir radio.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing masing sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Struktur Organisasi Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh



C. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

Provinsi Aceh dibagi menjadi 18 Kabupaten dan 5 kota, terdiri dari 289 kecamatan, 778 mukim dan 6.493 gampong atau desa, dengan luas wilayah Luas Provinsi Aceh 56.770,81 km², dan penduduk wilayah Provinsi Aceh berjumlah 5.096.248 jiwa, Lokasi suaka alam/objek wisata alam di Provinsi Aceh ada di sembilan lokasi, yaitu Taman Buru Linge Isaq, Cagar Alam Serbajadi, Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Wisata dan Taman Laut Pulau Weh Sabang, Cagar Alam Jantho, Hutan untuk Latihan Gajah (PLG), Taman Wisata Laut Kepulauan Banyak, dan Suaka Margasatwa Rawa Singkil, seiring dengan itu pertumbuhan pembangunan infrastruktur telekomunikasi mengalami pertumbuhan begitu pesat yang sebarannya tidak tertumpuh pada 1 (satu) Kabupaten/Kota saja namun menyebar seperti pembangunan transportable, layanan internet dan akses jaringan telekomunikasi. Begitu pula dengan pengguna spektrum frekuensi radio mengalami peningkatan yang cukup signifikan seperti penyelenggara broadcasting, radio konsesi, operator seluler dan penyelenggara TV kabel yang tumbuh, dan jumlah pengguna spektrum frekuensi radio yang berizin (ber ISR) berjumlah 13.118 ISR. Berdasarkan Peraturan Menkominfo RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menkominfo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, tugas dan fungsi Balmon SFR Kelas II Banda Aceh disamping melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap frekuensi radio juga melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perangkat telekomunikasi, sehubungan dengan hal tersebut Balmon SFR Kelas II Banda Aceh dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi di lapangan dihadapkan dengan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Perangkat utama monitoring/ukur maupun perangkat pendukung SMFR yang ada pada Balmon SFR Kelas II Banda Aceh saat ini secara jumlah masih terbatas sehingga dibutuhkan revitalisasi atau pengadaan perangkat telekomunikasi yang baru.
2. Sumber daya manusia ASN yang terdapat pada Balmon SFR Kelas II Banda Aceh yang memiliki kompetensi teknis cukup terbatas sehingga dipandang perlu penambahan personil bidang teknis maupun peningkatan kemampuan (*Capacity Building*)
3. Anggaran dalam rangka peningkatan kompetensi/kemampuan (*capacity Building*) di bidang teknis perlu ditingkatkan.
4. Regulasi penggunaan spektrum belum komprehensif yang belum menampung perkembangan teknologi maupun bisnis telekomunikasi di Indonesia, sehingga implementasi regulasi spektrum yang belum optimal, hal ini dibutuhkan sosialisasi yang intensif yang tepat sasaran dan tepat guna.
5. Masih ditemukan penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis atau belum memiliki Izin Stasiun Radio (ISR).

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh meliputi :

1. Pendahuluan yang berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
2. Perencanaan kinerja berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
3. Akuntabilitas kinerja yang berisikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran;
4. Penutup berisikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh sebagai Unit Pelaksana Teknis bidang monitoring frekuensi radio Ditjen SDPPI mendukung sepenuhnya rencana strategis tahun 2015-2019 yang disusun oleh Direktorat Jenderal SDPPI, agar mampu memenuhi kebutuhan pencapaian-pencapaian pembangunan nasional yang telah dicanangkan. Berdasarkan situasi dan mandat perundangan ini serta arah kebijakan pembangunan nasional dibidang konektivitas.

B. SASARAN PROGRAM

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh sebagai Unit Pelaksana Teknis bidang monitor spektrum frekuensi radio Ditjen SDPPI mendukung sepenuhnya program Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika pada periode 2015 – 2019 yang telah disusun adalah sasaran program yang akan dicapai.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, maka Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh memiliki peran dalam mencapai beberapa target indikator kinerja. Sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja Ditjen SDPPI tahun 2019 dapat disajikan pada tabel berikut:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1. Persentase % kabupaten/kota yang dapat di monitor	80%
		2. Persentase % stasiun radio penyiaran (radio/TV) yang terukur sesuai dengan ISR	35%
		3. Persentase (100 %) jumlah aduan/klaim yang diselesaikan	95%
		4. Persentase % kepatuhan penggunaan frekuensi radio di wilayah UPT	80%
		5. Persentase % kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR	85%
		6. Persentase % berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur UPT	85 %

2.	Terwujudnya Tata Kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang Bersih, Efisien dan Efektif	7.Persentase % terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT	100%
		8.Persentase % terlaksananya UNAR	100%
		1. Persentase % pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio	100%
		2.Persentase % layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100%

Jumlah anggaran yang tersedia untuk mendukung kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 9.014.036.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 4.857.002.000,- dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 4.157.034.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, LKIP 2019 memiliki fokus utama mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran program yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara lengkap capaian kinerja dari rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1.	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1. Persentase % kabupaten/kota yang dapat di monitor	80%	82,61%
		2. Persentase % stasiun radio penyiaran (radio/TV) yang terukur sesuai dengan ISR	35%	78,15%
		3. Persentase % jumlah aduan/klaim yang diselesaikan	95%	100%
		4. Persentase % kepatuhan penggunaan frekuensi radio di wilayah UPT	80%	89,04%
		5. Persentase % kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR	85%	80,25%
		6. Persentase % berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur UPT	85%	96,33%
		7. Persentase % terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT	100%	100%
		8. Persentase % terlaksananya UNAR	100%	100%
2.	Terwujudnya Tata Kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang Bersih, Efisien dan Efektif	1. Persentase % pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio	100%	100%
		2. Persentase % layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100%	100%

SASARAN 1. MENINGKATNYA LAYANAN MONITORING, PENGUKURAN, INSPEKSI DAN PENERTIBAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO SERTA PENANGANAN GANGGUAN FREKUENSI RADIO

- IK-1 Persentase (%) Kabupaten/kota yang dapat Dimonitor
Indikator Kinerja Persentase (%) Kabupaten/kota yang dapat dimonitor memiliki target sebesar 80%. Pada tahun 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh merencanakan pelaksanaan monitoring spektrum frekuensi radio sebanyak 10 kali di 19 wilayah

kota/kabupaten Propinsi Aceh dengan capaian kinerja 82,61 % dari yang ditargetkan dengan jumlah kegiatan sebanyak 12 kali, dari 12 kegiatan tersebut telah termonitor okupansi pendudukan 22 subservice di 19 kabupaten/kota dari 23 wilayah kabupaten/kota yang ada di Prov. Aceh. Dengan demikian indikator kinerja persentasi (%) kabupaten/kota yang dapat dimonitor melebihi target yaitu 82,61% dari 80% yang ditargetkan.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaiannya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase %, Kabupaten/kota yang dapat dimonitor	80%	82,61%	103,26%

Rincian capaian indikator kinerja 82,61 % kabupaten/kota yang dapat dimonitor sebagai berikut :

Tabel hasil wilayah kabupaten/kota termonitor

No	Wilayah	Persentase Data Hasil Observasi dan Monitoring Pendudukan Pita Frekuensi (dalam %)																						
		Maritim & Marabahaya (475-525.5 kHz) Mn	Radio AM (535-1600.5 kHz) Mn	Marabahaya & panggilan (2175.5-2300.5 kHz) Mn	Penerbangan n HF 6 MHz (6325-6765 MHz) Mn	Penerbangan n HF 13 MHz (11175-13400 MHz) Mn	Radio FM (87.5-108 MHz) Mn	Penerbangan VHF (117-137 MHz) Mn	Konsesi, Maritim VHF (150-174 MHz) Mn	Televisi VHF, Bengkang, Hutan, (180-230 MHz) Mn	Tetap, Bengkang, Hutan, (230-430 MHz) Mn	Konsesi, Maritim VHF (430-430 MHz) Mn	Televisi UHF (470-680 MHz) Mn	Trunking, Selular 800 (800-880 MHz) Mn	Selular 900 (900-960 MHz) Mn	Potensi Broadband 1400 (1400-1500 MHz) Mn	Selular 1800 (1800-1900 MHz) Mn	Potensi Broadband 1900 (1800-1920 MHz) Mn	Selular 2100 (2100-2170 MHz) Mn	BWA 2.3 GHz (2300-2400 MHz) Mn	Broadband, Satelit (2500-2600 MHz) Mn	BWA 3.3 GHz (3300-3400 MHz) Mn	Potensi Broadband 5 GHz (5000-5800 MHz) Mn	
1	Aceh Barat	0	0	0	0	0	11,33	0	1,46	0	0,16	1,12	0,59	0,54	55,03	0	37,17	0	20,58	0	0	3,35	3,98	
2	Aceh Barat Daya	0	0	0	0	0	1,46	0	0,52	0,45	0,52	0	0	0,2	36,6	0	32,7	0	12,98	17,48	0	0	2,59	
3	Aceh Besar	57,48	56,56	52,16	20,16	31,15	88,73	88,08	67,40	66,24	-	64,38	49,28	33,83	56,02	22,33	47,38	16,87	33,29	29,09	23,89	29,69	26,68	
4	Aceh Singkil	0	0	0	0	0	4,14	0	0,52	0	0,07	0	0	0,41	36,98	0	29,23	0	10,98	0	0	0	0,02	
5	Aceh Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	0,08	0,02	0,33	0,11	29,83	1,989	19,37	32,99	1,403	26,86	0,00	30,61	16,33	0,00	0,00	3,14	
6	Aceh Tengah	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	6,35	0,86	0,09	0,51	18,15	12,88	0,32	0,71	61,26	17,40	45,01	43,82	22,99	34,50	0,05	0,00	0,03	
9	Aceh Tenggara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	1,87	0,62	1,50	30,23	6,43	12,76	43,41	0,00	43,37	0,00	15,72	41,58	9,37	0,00	4,13	
10	Aceh Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,60	0,31	0,49	0,10	29,17	1,49	13,71	48,22	3,75	41,28	0,00	25,07	39,78	0,00	0,00	14,36	
11	Aceh Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61	0,26	0,42	0,67	0,17	11,56	0,52	12,76	39,66	0,00	36,99	0,00	19,36	0,00	0,00	0,00	0,03	
12	Bener Meriah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	0,20	0,32	0,04	0,17	11,52	0,35	0,08	37,35	0,00	25,86	0,01	9,88	28,05	0,00	0,00	1,43	
13	Bireuen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,39	2,67	2,19	0,09	0,00	12,74	2,59	13,57	43,72	2,58	31,58	1,50	18,78	19,34	0,00	0,00	4,15	
		0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	31,27	7,00	10,00	12,00	20,00	30,00	30,00	2,00	51,23	0,00	48,30	0,00	52,12	20,00	0,00	0,00	23,36	
		0,00	0,27	0,00	5,00	10,00	36,73	3,00	0,00	13,00	15,00	33,21	27,63	26,70	45,97	0,00	52,36	0,00	53,47	53,21	31,20	0,00	15,40	
14	Gayo Lues	0,00	2,30	14,00	10,00	0,00	39,87	5,00	6,61	8,70	16,23	34,21	29,87	30,26	46,73	0,00	56,72	0,00	54,12	48,72	0,00	0,00	21,12	
15	Nagan Raya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,11	0,19	0,14	0,20	28,04	0,00	24,37	0,03	18,64	0,00	0,05	0,00	0,03	
16	Pidie	0,00	1,55	0,00	2,47	0,00	36,92	4,50	0,23	6,83	24,69	28,41	20,38	13,05	41,81	37,98	51,53	6,67	22,60	9,06	1,25	0,35	0,94	
		0,00	3,00	0,00	0,00	1,00	35,00	8,00	2,00	5,00	8,00	25,00	20,00	28,32	40,23	2,43	35,98	6,74	28,79	10,23	0,00	0,00	3,23	
17	Pidie Jaya	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	38,00	5,00	2,00	4,00	10,00	30,00	20,00	30,00	45,00	2,00	35,00	0,00	30,00	15,00	0,00	0,00	5,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16	0,08	0,57	0,03	0,08	11,43	0,49	12,80	39,74	0,00	35,15	1,62	24,66	25,51	30,30	0,00	4,98	
		0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	30,46	5,00	2,80	1,54	5,32	14,48	8,90	18,76	38,76	0,00	34,13	0,30	24,66	14,32	1,23	0,00	3,12	
18	Simeulue																							
19	Banda Aceh	27,42	26,51	24,93	22,69	23,69	86,93	85,97	71,87	76,72	-	71,73	49,38	32,93	51,32	26,19	53,74	20,71	37,63	34,44	23,85	25,62	25,12	
20	Langsa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	0,04	0,28	0,04	0,05	10,44	3,92	10,98	24,51	11,51	42,06	0,00	28,56	16,24	0,00	0,00	1,31	
21	Lhokseumawe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,66	0,00	0,42	0,85	0,00	11,81	1,65	24,04	40,97	3,17	45,78	0,00	20,70	18,24	0,00	2,75	0,03	
22	Sabang	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	11,52	7,91	3,76	1,85	4,17	1,01	11,59	28,11	55,87	0,00	40,97	7,66	17,94	29,24	0,00	0,00	0,03	
23	Subulussalam	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	14,16	1,87	0,82	0,02	0,03	15,64	9,82	13,80	41,05	0,19	34,12	0,06	13,62	26,47	0,00	0,00	0,12	

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa dari 23 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Aceh telah termonitor 19 kabupaten/Kota pada 22 pita frekuensi yang harus dimonitor.

Berdasarkan penjelasan diatas, disimpulkan bahwa capaian untuk indikator kinerja “Persentase (%) Kabupaten/kota yang dapat dimonitor” yang ditargetkan mencapai 80%, secara akumulasi sampai dengan Desember 2019 telah tercapai 82,61%.

2. IK-2 Persentase (%) Stasiun Radio Siaran (Radio dan TV) yang terukur sesuai dengan ISR
Persentase (%) stasiun radio siaran (Radio dan TV) yang terukur sesuai dengan ISR memiliki target sebesar 35%. Sepanjang tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh telah melaksanakan pengukuran parameter teknis frekuensi radio di wilayah Provinsi Aceh, dari total sebanyak 119 stasiun dengan jumlah stasiun yang berhasil diukur dan sesuai dengan ISR sebanyak 93 stasiun. Dengan demikian indikator kinerja stasiun radio siaran (Radio dan TV) yang terukur sesuai ISR telah tercapai melebihi target yaitu 78,15%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase % stasiun radio penyiaran (radio dan TV) yang terukur sesuai dengan data ISR	35%	78,15%	223,29%

Capaian indikator kinerja persentase (%) stasiun radio siaran (radio dan TV) yang diukur sesuai dengan ISR dapat lihat pada rincian sebagai berikut :

Tabel Hasil Pengukuran Stasiun Radio Siaran dan TV Siaran di Wilayah Provinsi Aceh

No	Wilayah Kab / Kota	Jumlah ISR Broadcasting	Jumlah ISR Broadcasting Terukur		Persentase (%)
			Radio Siaran FM	TV Siaran UHF	
1	Kabupaten Aceh Barat	6	6	0	100,00
2	Kabupaten Aceh Barat Daya	1	1	0	100,00
3	Kabupaten Aceh Besar	10	8	0	80,00
4	Kabupaten Aceh Jaya	3	0	0	0,00
5	Kabupaten Aceh Selatan	4	0	0	0,00
6	Kabupaten Aceh Singkil	4	0	0	0,00
7	Kabupaten Aceh Tamiang	1	1	0	100,00
8	Kabupaten Aceh Tengah	5	5	0	100,00
9	Kabupaten Aceh Tenggara	3	2	0	66,67
10	Kabupaten Aceh Timur	2	1	0	50,00
11	Kabupaten Aceh Utara	2	0	0	0,00
12	Kabupaten Bener Meriah	1	0	0	0,00
13	Kabupaten Bireuen	8	8	0	100,00
14	Kabupaten Gayo Lues	0	0	0	0,00
15	Kabupaten Nagan Raya	0	0	0	0,00
16	Kabupaten Pidie	8	7	1	100,00
17	Kabupaten pidie Jaya	1	0	0	0,00
18	Kabupaten Simeulue	2	0	0	0,00
19	Kota Banda Aceh	38	21	15	94,74
20	Kota Langsa	3	2	0	66,67
21	Kota Lhokseumawe	9	7	2	100,00
22	Kota Sabang	6	2	4	100,00
23	Kota Subulussalam	2	0	0	0,00
Total ISR Terukur		119	71	22	78,15

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa jumlah stasiun radio (radio siaran dan TV) yang terukur sejumlah 93 stasiun dari 23 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Aceh

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2019, indikator “Persentase (%) Stasiun Radio Siaran (Radio dan TV) yang terukur sesuai dengan data ISR” telah mencapai 78,15% dari target 35%, sehingga dapat disimpulkan bahwa telah melampaui target.

3. IK-3 Persentase (%) Jumlah Aduan/klaim yang Diselesaikan

Indikator Kinerja Persentase (%) Jumlah aduan/klaim yang diselesaikan memiliki target realisasi sebesar 95%. Pada tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh mendapat aduan/klaim dari masyarakat/ pengguna frekuensi sejumlah 3 (tiga) aduan, dari 3 (tiga) aduan gangguan frekuensi radio tersebut telah tertangani dengan hasil baik (clear).

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase % jumlah aduan/klaim yang diselesaikan	95%	100%	105,26%

Dari capaian indikator kinerja diatas dapat kami rincikan hasil kegiatan sebagai berikut :

Tabel Pelaksanaan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio (4 kegiatan) :

NO	BULAN	KEGIATAN	HASIL
1	Juli	Penanganan Gangguan Radar BMKG Bandara Sultan Iskandar Muda	- Gangguan radar BMKG Bandara SIM pada range frekuensi 5570 s.d 5670 MHz (Frekuensi ISR 5640 MHz) - Gangguan bersumber dari penggunaan perangkat WAP 5,8 GHz yang tidak sesuai izin kelas, oleh : Dinas Kominfo dan Statistik Kota Banda Aceh, PT. Aceh Link Media dan UD Permata Bunda Mart - Perangkat pengganggu telah di segel dan sita karena penggunaannya tidak sesuai dengan izin kelas - Gangguan dinyatakan clear.
2	November	Penanganan Gangguan PT. Smart Telecom, tbk	- Gangguan pada frekuensi 12.905 / 13.171 MHz (Frekuensi Rx/Tx MW Link) di Site ID / Name : NACH-0031 / Labui - Gangguan bersumber dari perangkat MW Link PT. Telkom dengan frekuensi yang sama persis dengan frekuensi MW Link PT. Smart Telecom. - Perangkat MW Link PT. Telkom telah disegel karena belum memiliki ISR. - Gangguan dinyatakan clear
3	November	Penanganan Gangguan Radar BMKG Bandara Sultan Iskandar Muda	- Berdasarkan hasil pemantauan frekuensi radio di Kab. Bireuen oleh tim obsmon, termonitor stasiun WAP 5,8 GHz yang bekerja pada alokasi frekuensi radar cuaca BMKG Bandara SIM yaitu di : 5570 s.d 5670 MHz yang sangat berpotensi menimbulkan gangguan mengingat wilayah layanan Radar SIM sampai ke Kota Lhokseumawe. - Beberapa pengguna yang tidak sesuai dengan alokasi izin kelas adalah Kantor Bupati Aceh Utara, Toko Deni Elektronik, Multi Jasa Net, CV. Dukom Net, Star Net,

			Reza Net, Nirwana Net, Hotspot 86 Net, Simtech hotspot, Bintang Hotspot, Nasa Hotspot, SPM Net. - Kepada pengguna yang melanggar telah diberi Surat Peringatan agar menggunakan sesuai alokasi sesuai izin kelas, dan pengguna yang menyimpang telah disesuaikan ke alokasi izin kelas (5725 sd 5825 MHz) pada saat kegiatan itu juga,
--	--	--	---

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa penanganan aduan/klaim gangguan frekuensi yang masuk sejumlah 3 (tiga) aduan/klaim. Keseluruhan aduan dan temuan telah ditangani dengan baik (clear).

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2019, indikator “Persentase (%) Jumlah aduan/klaim yang diselesaikan” telah mencapai 100%, dari target 95%.

4. IK-4 Persentase (%) Kepatuhan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah Kerja UPT

Indikator Kinerja persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT memiliki target 80%, Sepanjang tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh telah melaksanakan penertiban frekuensi radio sebanyak 3 (tiga) kali di wilayah Provinsi Aceh, ke 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- Penertiban frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika di Kota Banda Aceh dan Kab. Aceh Besar
- Penertiban frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika di Kab. Aceh Barat
- Penertiban frekuensi radio yang berhubungan dengan TV kabel di Kab. Pidie

Tindak lanjut penertiban frekuensi radio telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali di wilayah Provinsi Aceh, yaitu :

- Tindak lanjut dalam rangka penertiban frekuensi radio di Kab. Pidie, Bireuen, Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe (PT. Telekomunikasi Indonesia dan PT. XL Axiata)
- Tindak lanjut dalam rangka penertiban frekuensi radio di Kab. Aceh Timur, Aceh Tamiang, Kota Lhokseumawe, Langsa (PT. Hutchison 3 Indonesia dan PT. XL Axiata)
- Tindak lanjut hasil penertiban frekuensi radio (gelar perkara) di Kota Banda Aceh.

Dengan demikian indikator kinerja persentase (%) kepatuhan penggunaan frekuensi radio di wilayah kerja UPT telah tercapai 89,04% dari 80% yang ditargetkan.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase % kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT	80%	89,04%	111,3%

Dari capaian indikator kinerja diatas dapat kami rincikan pula hasil kegiatan sebagai berikut :

Tabel hasil Penertiban Frekuensi Radio di Wilayah Provinsi Aceh

Wilayah Kab/Kota	Jumlah TO	Hasil Operasi		Tindak Lanjut		Keterangan
		Peringatan	Sita	Pengurusan Izin	Proses Hukum	
Banda Aceh	4	0	4	0	0	
Banda Aceh dan Aceh Besar	14	0	59	6	2	
Aceh Barat	8	0	27	3	0	
Pidie	1	1	0	0	0	

Tabel Tindak Lanjut Hasil Penertiban di Provinsi Aceh

No	Jumlah Hasil Operasi	Tindak Lanjut			Keterangan
		Pengurusan izin	Proses Hukum		
			SP3	P21	
1	9	7	0	0	Di segel
2	7	7	0	0	Di segel
3	2	0	0	1	1 (satu) kasus dilanjutkan proses Penyidikan tahun 2020

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan penertiban frekuensi radio dan tindak lanjut hasil penertiban telah dilaksanakan melebihi dari yang diprogramkan yaitu 4 (empat) kegiatan dan realisasinya 6 (enam) kegiatan, dengan jumlah perangkat yg disita/segel 106 perangkat dan diperingatkan sebanyak 1 pengguna. Jumlah yang disita / segel tersebut dari kegiatan operasi penertiban dan penanganan gangguan frekuensi radio. Jumlah yang diperingatkan tersebut dari kegiatan operasi penertiban, penanganan gangguan frekuensi radio, pengukuran dan validasi pengguna frekuensi radio.

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2019, indikator “Persentase (%) kepatuhan pengguna frekuensi radio di wilayah kerja UPT” telah melampaui target yang ditetapkan.

5. IK-5 Persentase (%) Kesesuaian Data Hasil Inspeksi dengan Data ISR

Indikator Kinerja Persentase (%) Kesesuaian Data Hasil Inspeksi dengan Data ISR memiliki target realisasi sebesar 85%, Sepanjang tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh telah melaksanakan inspeksi dalam rangka validasi data ISR sejumlah 10 kali kegiatan di wilayah Provinsi Aceh dengan hasil yang diperoleh sejumlah 1048 data dari 1306 jumlah data sample yang ditargetkan pada tahun 2019, dengan capaian indikator kinerja persentase (%) kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR telah mencapai 80,25% dari 85% yang ditargetkan

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase % kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR	85%	80,25%	94,41%

Dari capaian indikator kinerja diatas dapat kami rincikan pula hasil kegiatan sebagai berikut :

Tabel Hasil Inspeksi Data Frekuensi Radio Tahun 2019

No	Penyelenggara	Jumlah Stasiun Radio			Total Stasiun Radio	Keterangan
		Legal	Ilegal	Tidak Sesuai ISR		
1	PT. Indosat	40	0	10	10	20 Stasiun tidak aktif (off air)
2	PT. XL Axiata	624	34	496	62	~ 66 Stasiun tidak aktif (off air) ~ Pengguna non ISR telah ditertibkan
3	PT. Telkomsel	409	12	171	136	~ 102 Stasiun tidak aktif (off air) ~ Pengguna non ISR telah ditertibkan
4	PT. H3I	488	2	412	28	~ 48 Stasiun tidak aktif (off air) ~ Pengguna non ISR telah ditertibkan
5	Pengguna lainnya	60	0	43	12	5 Stasiun tidak aktif (off air)

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa kegiatan inspeksi dalam rangka validasi data ISR di wilayah Provinsi Aceh terlaksana sejumlah 10 (sepuluh) kegiatan, dengan jumlah data MW

sebanyak 1609 link yang terdiri dari 1487 legal, 86 diduga illegal, 1015 sesuai ISR dan 236 tidak sesuai ISR serta 236 link telah off air. Selain inspeksi dalam rangka validasi data terhadap stasiun link, juga dilakukan inspeksi dan validasi data terhadap stasiun radio konsesi dan dinas siaran dengan data yang diperoleh yaitu 60 stasiun, yang terdiri dari : 60 legal, 33 sesuai ISR dan 22 tidak sesuai ISR serta 5 stasiun telah off air. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator persentase (%) kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR sebesar 80,25 % yaitu dari 1306 stasiun yang dilakukan validasi, 1048 stasiun telah sesuai.

Capaian kinerja pada indikator persentase (%) kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR sebesar 80,25 % berdasarkan analisa disebabkan :

- a. Banyak ditemukan stasiun microwave link yang tidak akurat menggunakan parameter teknis mandatory yaitu : frekuensi, bandwidth, koordinat dan alamat. Hal ini terjadi karena operator seluler saat pengurusan ISR baru tidak menginput data teknis (frekuensi dan bandwidth) serta data administrasi (koordinat dan alamat) stasiun radio link secara benar, dan juga tidak menginput data alamat sesuai alamat dilapangan;
- b. Masih rendahnya tingkat kesadaran operator seluler untuk mengurus ISR terlebih dahulu, sebelum mengoperasikan stasiun radio linknya;
- c. Dalam proses pengurusan ISR baru / penyesuaian ISR, pihak operator seluler belum menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 2 Tahun 2019 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Keperluan *Microwave Link* Titik ke Titik (Point to Point), yang didalamnya mengatur jarak minimal dari penggunaan tiap pita frekuensi, sehingga beberapa pengajuan ISR baru / penyesuaian ISR ditolak oleh *system* karena secara teknis dan administrasi pengajuan frekuensi baru tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2019, indikator “Persentase (%) Kesesuaian Data Hasil Inspeksi dalam rangka validasi data ISR” telah dicapai 80,25 %, kepada pengguna yang tidak sesuai ISR dan illegal, telah diberi surat peringatan dan atau dilakukan penyitaan /segel perangkat.

IK-6 Persentase (%) Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitor/Ukur di UPT

Indikator Kinerja Persentase (%) Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitor/Ukur memiliki target realisasi sebesar 85 %. Berdasarkan data capaian diketahui bahwa nilai dari realisasi sampai akhir Desember 2019 sebesar 96.33 %, sehingga prosentase capaian indikator kinerja ini adalah 96,33%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

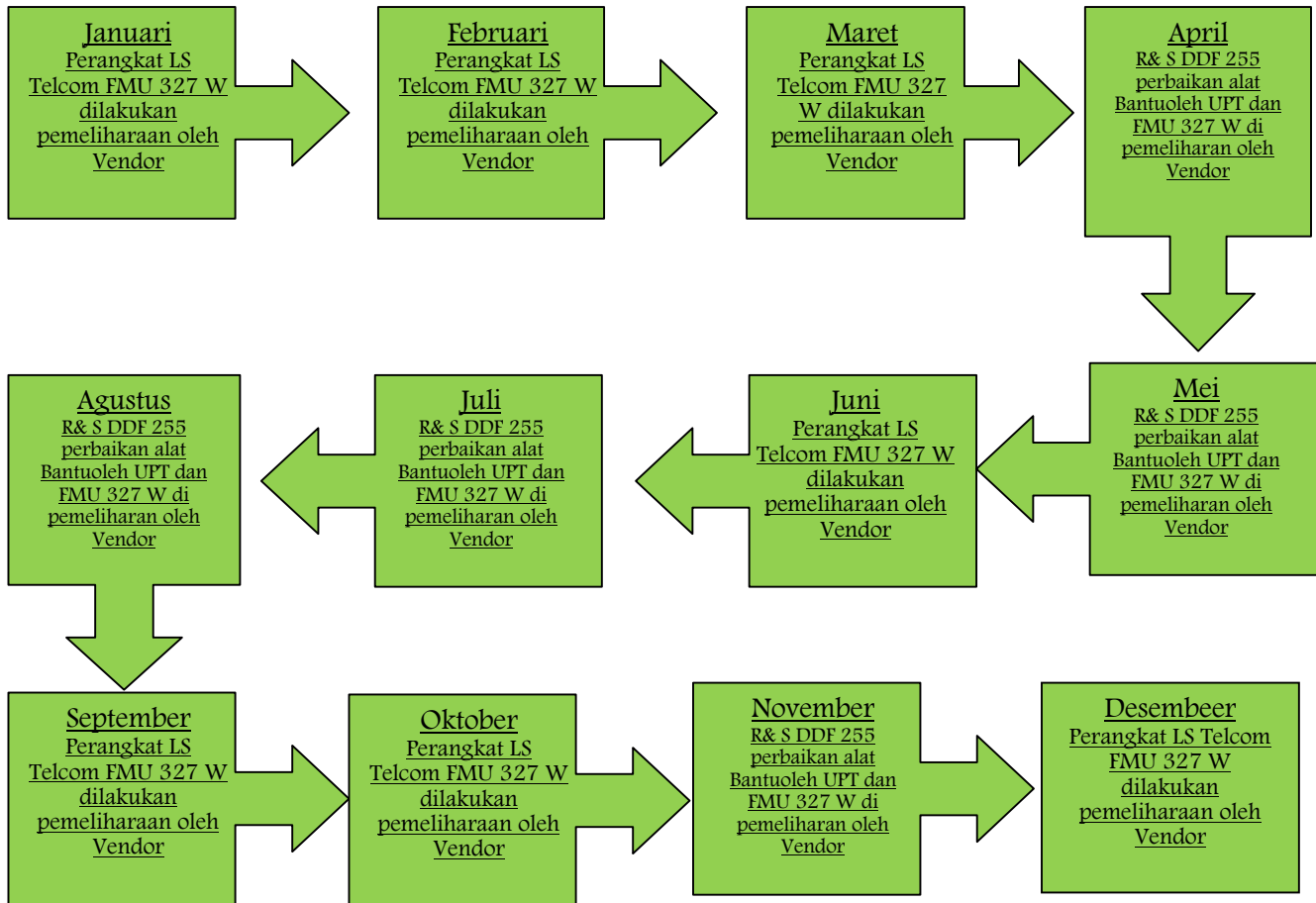
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur di UPT	85 %	96.33 %	113.3 %

Dari capaian indikator kinerja diatas dapat kami rincikan pula hasil kegiatan sebagai berikut :

Kondisi Perangkat SMFR Trastportable Sebagai Berikut;

NO	BULAN	SITE LAMBARO	SITE NAGAN RAYA	SITE SABANG	SITE LAWE SIGALA - GALA	KET
1	JANUARI	Ok	Ok	Ok	Ok	Remote Desktop dari CCU UPT
2	FEBRUARI	Inspeksi site	Ok	Ok	Ok	
3	MARET	Ok	Inspeksi site	Ok	Ok	
4	APRIL	Ok	Ok	Inspeksi site	Ok	
5	MEI	Inspeksi site	Ok	Ok	Ok	
6	JUNI	Ok	Ok	Ok	Ok	Remote Desktop dari CCU UPT
7	JULI	Ok	Ok	Inspeksi site	Inspeksi site	
8	AGUSTUS	Ok	Ok	Ok	Ok	Remote Desktop dari CCU UPT
9	SEPTEMBER	Inspeksi site	Ok	Ok	Ok	
10	OKTOBER	Ok	Ok	Inspeksi site	Ok	
11	NOVEMBER	Ok	Inspeksi site	OK	Ok	
12	DESEMBER	Ok	Ok	Inspeksi site	Ok	

Pemeliharaan Perangkat SMFR Mobil Unit dan Perangkat Pendukung Lainnya:



Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator “Persentase (%) berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitor/ukur di UPT ”telah terjadwal dan dilaksanakan sesuai jadwal, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai (100%).



Gambar : Koordinasi Pengecekan salah satu Site Transportable berlokasi di Kota Sabang

IK-7 Persentase (%) Terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT

Indikator Kinerja Persentase (%) Terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT memiliki target realisasi sebesar 100 persen. Berdasarkan data yang dilaporkan dapat diketahui bahwa capaian Indikator hingga akhir Desember 2019 sebesar 100% sehingga persentase capaian Indikator Kinerja ini adalah 100%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Terdistribusinya SPP, ST dan /ISR oleh UPT	100%	100%	100%

Dari capaian indikator kinerja diatas dapat kami rincikan pula hasil kegiatan sebagai berikut :

Tabel Rekapitulasi Pendistribusian SPP BHP Frekuensi Radio

NO	BULAN	BARU	PERPANJANGAN	R1	R2	R3	R4	JUMLAH
1	JANUARI	1	42	6	2	~	~	51
2	FEBRUARI	~	21	21	3	2	1	48
3	MARET	~	19	12	7	1	1	40
4	APRIL	1	30	12	10	8	~	61
5	MEI	1	13	4	4	10	~	32
6	JUNI	~	30	9	3	1	2	45
7	JULI	~	25	6	5	1	1	38
8	AGUSTUS	3	23	4	2	2	1	35
9	SEPTEMBER	3	38	12	2	2	~	57
10	OKTOBER	3	18	6	2	1	~	30
11	NOVEMBER	25	20	9	4	~	1	59
12	DESEMBER	8	26	5	7	4	1	51
JUMLAH		45	305	106	51	32	8	547

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa pendistribusian SPP dan ST oleh UPT di wilayah Provinsi Aceh telah terdistribusi sesuai SPP dan ST yang diterbitkan.

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2019, indikator “Persentase (%) Terdistribusinya SPP dan ST oleh UPT” telah didistribusikan sejumlah yang diterbitkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai 100%.

IK-8 Persentase (%) Pelaksanaan UNAR

Indikator Kinerja Persentase (%) Pelaksanaan UNAR memiliki target realisasi sebesar 100 persen. Berdasarkan data yang dilaporkan dapat diketahui bahwa capaian indikator hingga akhir Desember 2019 adalah sebesar 100%, sehingga persentase capaian indikator kinerja ini adalah 100%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Layanan Monitor, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	Persentase (%) Pelaksanaan UNAR	100%	100%	100%

Dari capaian indikator kinerja diatas dapat kami rincikan pula hasil kegiatan sebagai berikut :

Tabel Pelaksanaan UNAR di Provinsi Aceh

No	Tempat	Jumlah Peserta UNAR					
		Jumlah Pendaftar			Jumlah Kelulusan		
		YD	YC	YB	YD	YC	YB
1	Kab. Aceh Timur	42	5	3	41	5	3

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa sepanjang 2019, indikator “Persentase (%) Pelaksanaan UNAR” telah dilaksanakan sesuai program kerja tahun anggaran 2019, sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai 100%.



Gambar : Acara pembukaan kegiatan Ujian Negara Amatir Radio sistem Computer Assisted Test (C.A.T)



Gambar : Suasana saat berlangsung Ujian Negara Amatir Radio system C.A.T

SASARAN 2. TERWUJUDNYA TATA KELOLA UPT MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO YANG BERSIH, EFISIEN DAN EFEKTIF

Sebagai upaya mendukung peningkatan pada pelayanan publik bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika Ditjen SDPPI, maka Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh melakukan kegiatan berupa :

- (1) Kegiatan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio
- (2) Kegiatan layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan

IK-1 Persentase (%) Pelaksanaan Koordinasi / Pendampingan Pengurusan Penyelesaian Piutang BHP Frekuensi Radio

Indikator Kinerja Pelaksanaan koordinasi / pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio memiliki target sebesar 100 persen. Berdasarkan data yang dilaporkan dapat diketahui bahwa capaian Indikator hingga akhir Desember 2019 adalah sebesar 100%, sehingga prosentase capaian indikator kinerja ini adalah 100%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya tata kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang bersih, efektif dan efisien	Persentase (%) pelaksanaan koordinasi / pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio	100%	100%	100%

Dari capaian indikator kinerja diatas dapat kami rincikan pula hasil kegiatan sebagai berikut :

No	Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan	Kegiatan
1	Mei	Lhokseumawe	Koordinasi Piutang
2	Juli	Kab. Aceh Jaya, Aceh Barat Daya dan Kab. Aceh Selatan	Pendampingan Pangurusan Piutang ke lapangan
3	Desember	Lhokseumawe	Koordinasi Piutang
4	Desember	Kota Banda Aceh, Aceh Besar dan Kab. Pidie Jaya	Pendampingan Pangurusan Piutang ke lapangan

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator Pelaksanaan Pendampingan Pengurusan Penyelesaian Piutang BHP Frekuensi Radio telah terlaksana sesuai target yang di tetapkan 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai.



Gambar. Koordinasi dengan Kasi Piutang Negara di KPKNL kota Lhokseumawe

IK-2 Persentase (%) Pelaksanaan Administrasi yang Dilaksanakan sesuai dengan Perencanaan

Indikator kinerja pelaksanaan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan memiliki target sebesar 100 persen. Berdasarkan hasil kegiatan diketahui bahwa telah dilaksanakan semua kegiatan yang direncanakan ditahun 2019 sehingga persentase capaian indikator kinerja ini adalah 100%.

Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan capaian setiap komponennya.

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terwujudnya tata kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang efektif, efisien dan efektif	Persentase (%) Pelaksanaan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100	100	100%

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan layanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio serta penanganan gangguan frekuensi radio di wilayah Provinsi Aceh yang merupakan tugas dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh, maka dibutuhkan layanan administrasi sehingga tercapai target yang telah direncanakan.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh dalam melaksanakan layanan administrasi yang sesuai perencanaan terbagi menjadi beberapa bagian yang terdiri dari :

- a. Perencanaan dan program
- b. Penatausahaan dan rumah tangga
- c. Kepegawaian
- d. Pelaksanaan anggaran

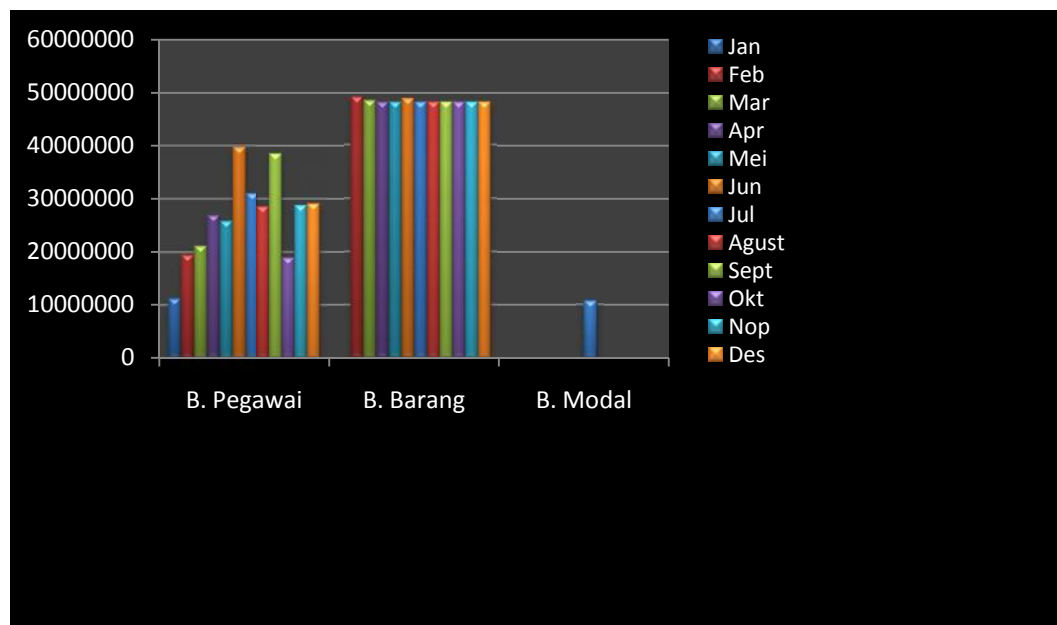
a. Perencanaan dan Program

Pada tahun 2019 jumlah anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh sebesar Rp. 9.014.036.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni dan PNBPF. Adapun rincian program kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh adalah :

No.	Kode Output	Uraian	Volume	Pagu
1	018	Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika, terdiri dari :	33 Kegiatan	Rp. 719.039.000,-
		1. Pemantauan frekuensi radio dan standar perangkat pos dan informatika di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh	10 Kegiatan	Rp. 201.571.000,-
		2. Operasi Penertiban Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh	3 Kegiatan	Rp. 68.624.000,-
		3. Inspeksi dalam rangka validasi di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh	7 Kegiatan	Rp. 157.446.000,-
		4. Pengukuran frekuensi Radio di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh	10 Kegiatan	Rp. 166.030.000,-
		5. Tindak Lanjut Hasil Penertiban	2 Kegiatan	Rp. 46.041.000,-
2	055	6. Ujian Negara amatir Radio	1 Kegiatan	Rp. 79.327.000,-
		Penyelesaian Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Balai Monitor, terdiri dari :	2 Kegiatan	Rp. 26.110.000,-
3	078	1. Penanganan Gangguan Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh	2 Kegiatan	Rp. 26.110.000,-
		Dukungan Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban	1 Layanan	Rp. 2.554.732.000,-

		Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio di UPT Ditjen SDPPI, terdiri dari :		
		1. Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML)		Rp. 846.000.000,-
		2. Dukungan Operasional Tugas Pokok dan Fungsi		Rp. 1.102.694.000,-
		3. Peningkatan Sarana dan Prasana Perkantoran		Rp. 406.528.000,-
		4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan		Rp. 199.510.000,-
4.	951	Layanan Internal (Overhead)	1 Layanan	Rp. 107.102.000,-
		1. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		Rp. 107.102.000,-
		2. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		~
		3. Kendaraan Bermotor		~
5.	994	Layanan Perkantoran	12 bulan	Rp. 5.607.053.000,-
		1. Gaji dan Tunjangan		Rp. 3.509.190.000,-
		2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor		Rp. 2.097.863.000,-

Agar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran di tahun 2019 lebih fokus, efektif dan efisien, maka Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh menetapkan rencana penggunaan anggaran (*disburstmen plan*)



Grafik : Rencana Penarikan Anggaran Tahun 2019

b. Penatausahaan dan Rumah Tangga

Ketatausahaan

Kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi pengagendaaan surat masuk dan surat keluar yang berasal dari lingkungan Kementerian Kominfo, Ditjen SDPPI dan jajaran pemerintah Propinsi Aceh, jajaran pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi Aceh serta para penyelenggara/pengguna spektrum frekuensi radio

- Surat masuk selama periode bulan Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebanyak 585 surat.
- Surat keluar yang diterbitkan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh selama periode bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 sebanyak 890 surat.

Kerumahtanggaan

- Pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan kantor, pemeliharaan perangkat pendukung monitoring serta peralatan rumah tangga kantor.
- Pengadaan Barang dan Jasa, dalam rangka menunjang kegiatan operasional maupun administrasi tahun anggaran 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh telah melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa sebagai berikut :

Data Pengadaan Barang dan Jasa (Belanja Barang dan Modal) Tahun 2019

No.	Uraian Pekerjaan	Volume Pekerjaan	Nomor Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)
1	Pemanfaatan Lahan untuk Penempatan Transportable	1 Paket	01/BALMON.11/PPK/01/2019	105.534.000
2	Pengadaan Kegiatan Pembinaan Mental dan Disiplin Pegawai	1 Paket	15/BALMON.11/PPK/04/2019	88.126.500
3	Pengadaan Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Paket	20/BALMON.11/PPK/04/2019	82.500.000
4	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1 Paket	29/BALMON.11/PPK/06/2019	105.930.000
5	Paket Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1 Paket	38/BALMON.11/PPK/10/2019	182.800.000

DAFTAR BMN SAMPAI DENGAN TAHUN 2019

Tabel Data Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2019

Nama Barang	Satuan	jumlah	Baik	Rusak
Mini Bus (penumpang 14 orng kebawah)	Unit	5	√	-
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lainnya	Unit	1	√	-
Sepeda Motor	Unit	4	√	-
Mobil Unit Monitoring Frekuensi	Unit	2	√	-
Battery Charge	Buah	3	√	-
Power Meter And Accessories	Buah	7	1	6
Spectrum Analyzer	Buah	5	4	1
SWR Meter	Buah	1	√	-
Scanner (Universal Tester)	Buah	1	√	-
Fieldstrength Meter	Buah	4	2	2
Mesin Ketik Listrik Potable 11-13 Inchi)	Buah	3	2	1
Lemari Besi/Metal	Buah	7	√	-
Lemari Kayu	Buah	13	√	-
Rak Besi	Buah	1	√	-
Filling Cabinet Besi	Buah	10	√	-
Brandkas	Buah	1	√	-
CCTV – Camera Control Television System	Buah	5	√	-
Mesin Absensi	Buah	1	√	-
Overhead Proyektor	Buah	2	1	1
Meja Kerja Kayu	Buah	34	√	-
Kursi Besi/Metal	Buah	116	114	2

Sice	Buah	4	√	-
Meja Rapat	Buah	24	21	3
Meja Resepsionis	Buah	1	√	-
Partisi	Buah	2	√	-

c. Kepegawaian

Pada tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh memiliki sumber daya manusia sejumlah 28 pegawai negeri sipil (PNS), 3 Calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan 14 pegawai kontrak (PPNPN)

➤ Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Pangkat

Pada tahun anggaran 2019 terdapat 6 (enam) pegawai Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh yang memperoleh kenaikan gaji berkala (KGB) dan terdapat 4 (empat) pegawai yang memperoleh kenaikan pangkat (KP) secara reguler, adapun data nama pegawai yang memperoleh KGB dan KP adalah sebagai berikut :

Data Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Pegawai Balmon Kelas II Banda Aceh

NO.	NAMA / NIP	GOL / RUANG	TMT	MASA KERJA
1	ZAHRUL AMRI HUTABARAT, S.T.,M.M. NIP. 19790915 200502 1 001	Penata Tk. I (III/d)	1 Februari 2019	14 TH 0 BLN
2	M. AMIN. NIP. 19660706 199203 1 001	Penata Muda III/a	1 Februari 2019	26 TH 06 BLN
3	ALRIZAL, S.T. NIP. 19670418 199003 1 006	Penata Tk. I (III/d)	1 Maret 2019	24 TH 0 BLN
4	SALAHUDDIN, S.E. NIP. 19760504 200912 1 001	Penata Muda III/a	1 Juni 2019	10 TH 06 BLN
5	RURI NUGRAHANI, S.T. NIP. 19820635 200312 2 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	1 Desember 2019	14 TH 0 BLN
6	PRASETIYO ADI NAGORO, S.T. NIP. 19840407 200912 1 003	Penata Muda Tk. I (III/b)	1 Desember 2019	8 TH 0 BLN

Data Kenaikan Pangkat (KP) Pegawai Balmon Kelas II Banda Aceh

NO	NAMA / NIP	URAIAN	TMT	MASA KERJA
1	ISTAWANDI, S.T. NIP. 19660427 199211 1 001	KP GOL (III/c) ke (III/d)	1 APRIL 2019	24 TH 5 BLN
2	M. AMIN NIP. 19660706 199203 1 001	KP GOL (III/a) ke (III/b)	1 APRIL 2019	20 TH 7 BLN
3	MUHARRAMI, S.T. NIP. 19821114 200912 1 001	KP GOL (III/a) ke (III/b)	1 APRIL 2019	9 TH 3 BLN
4	FITRIA, S.E. NIP. 19850827 200912 1 001	KP GOL (II/c) ke (III/a)	1 OKTOBER 2019	9 TH 9 BLN

Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia Tahun 2019

TAHUN	USIA			
2019	51 – 58 TAHUN	41 – 50 TAHUN	31 – 40 TAHUN	21 – 30 TAHUN
Jumlah	4	8	16	3

➤ **Pejabat Pengendali**

Data Pejabat Pengendali pada Balai Monitor SFR kelas II Banda Aceh

NO.	FUNGSIONAL	2019
1	Pengendali Frekuensi Radio Muda	2
2	Pengendali Frekuensi Radio Pertama	3
3	Pengendali Frekuensi Radio Pel. Lanjutan	2
4	Pengendali Frekuensi Radio Pelaksana	3
Jumlah		10

➤ **PPNS**

No	NAMA / NIP.	PANGKAT/GOL.	JABATAN	STATUS PPNS
1	MUSRIADI, S.H. NIP. 19620108 199003 1 002	Pembina (IV/a)	Kepala Balmon	PPNS Pusat
2	JUNAIDI, S.T., M.M. NIP. 19710727 199103 1 002	Pembina (IV/a)	Penyidik Pelaksana	PPNS Pusat
3	ZAHRUL AMRI HUTABARAT, S.T.,M.M. NIP. 19790915 200502 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Penyidik Pelaksana	PPNS Pusat

➤ Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada Tahun Anggaran 2019, telah terlaksana pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, instansi terkait serta peningkatan SDM melalui pembinaan mental dan disiplin pegawai (*outbond*). Adapun pendidikan formal, diklat, bimtek dan workshop yang diikuti oleh karyawan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh, adalah sebagai berikut :

1. Mengikuti Undangan Sosialisasi/Bimtek Pengadaan Barang/Jasa di Bogor pada tanggal 13 s.d 15 Februari 2019 diikuti oleh : Herdiansyah Putra, S.H.,M.H. dan Muharrami, S.T.
2. Menghadiri Undangan Bimtek Operasional Penggunaan Aplikasi Pemeliharaan SMFR di Bogor pada tanggal 4 s.d 6 Maret 2019 diikuti oleh : Munadi.
3. Menghadiri Undangan Rapat Kegiatan Bimbingan Teknis Pengawasan dan Pengendalian Alat dan Perangkat Telekomunikasi di Yogyakarta pada tanggal 20 s.d 22 Maret 2019 diikuti oleh : M. Jamil, S.T., M.Si.
4. Mengikuti Diklat *Training of Training* (ToT) 6.09 IMO *Course* 2019 di Jakarta pada tanggal 30 Juni s.d 10 Juni 2019 diikuti oleh : Prasetyo Adi Nagoro, S.T.
5. Mengikuti Pelatihan Dasar CPNS Golongan II (Batch II) di Jakarta dan Banda Aceh pada tanggal 28 April 2019 s.d 21 Mei 2019 diikuti oleh : Evi Yunarsih Pohan, A.Md. dan Zulinda Pratiwi Br. Sitepu, A.Md.
6. Mengikuti Pelatihan Dasar CPNS Golongan III (Batch I) di Jakarta dan Banda Aceh pada tanggal 4 Agustus 2019 s.d 21 11 Oktober 2019 diikuti oleh : Agus Nursalam Kitono, S.T.
7. Mengikuti OJT Ditjen SDPPI Tahun 2019 di Jawa Barat pada tanggal 12 Agustus 2019 s.d 01 September 2019 diikuti oleh : Evi Yunarsih Pohan, A.Md. dan Zulinda Pratiwi Br. Sitepu, A.Md.
8. Menghadiri Undangan Pelatihan Foto dan Video di Jakarta pada tanggal 19 s.d 21 Agustus 2019 diikuti oleh : Rusli.
9. Menghadiri Workshop Pemeliharaan (*Maintenance & Troubleshooting*) SMFR di Yogyakarta pada tanggal 26 s.d 31 Agustus 2019 diikuti oleh : Elok Berutu, S.T. dan Munadi.
10. Menghadiri Kegiatan *Refresh Training SMFR* Bergerak di Semarang pada tanggal 16 s.d 20 September 2019 diikuti oleh : Muhammad Husni, S.H., M.H. Rifki Wahyudiansyah, A.Md. dan Munadi.

11. Menghadiri Sosialisasi *Training* SAKTI Web, Pengendalian Retur SP2D dan Telaah Laporan Keuangan di Gedung Keuangan Negara Banda Aceh pada tanggal 18 September 2019 diikuti oleh : Ruri Nugrahani, S.T. dan Siti Julaikha.
12. Menghadiri Pemanggilan Peserta Manajemen *Survival & Assesmen* Kompetisi Batch Tahum 2019 di Bogor pada tanggal 22 s.d 27 September 2019 diikuti oleh : Alrizal, S.T.
13. Menghadiri Undangan Peserta Bimtek Persediaan di Bekasi Selatan pada tanggal 23 s.d 25 September 2019 diikuti oleh : Maulidin dan Armansyah.
14. Menghadiri Undangan Bimtek Keprotokolan Kemkominfo di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 3 s.d 6 September 2019 diikuti oleh : Maula Aprizal.
15. Menghadiri Undangan Bimtek Simpatik di Depok pada tanggal 29 s.d 31 Oktober 2019 diikuti oleh : Herdiansyah Putra, S.H., M.H.
16. Menghadiri Undangan Pelatihan Penerapan, Penilaian dan Review PIPK Pemerintah Pusat dan Tingkat UAKPA di Surabaya pada tanggal 21 s.d 23 Nopember 2019 diikuti oleh : M. Jamil, S.T., M.Si. dan Herdiansyah Putra, S.H., M.H.
17. Mengikuti Pelatihan Pembentukan Pengendali Frekuensi Radio Tingkat Terampil Tahun 2019 di Tangerang dan Bogor pada tanggal 10 November 2019 s.d 19 Desember 2019 diikuti oleh : Evi Yunarsih Pohan, A.Md.
18. Menghadiri Undangan Peserta Bimtek SPSE 4.3 Gel. II di Bogor pada tanggal 25 s.d 27 November 2019 diikuti oleh : Muharrami, S.T.
19. Mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi Berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di Bekasi, Jawa Barat pada tanggal 09 s.d 14 Desember 2019 diikuti oleh : Elok Berutu, S.T.

D. Pelaksanaan Anggaran

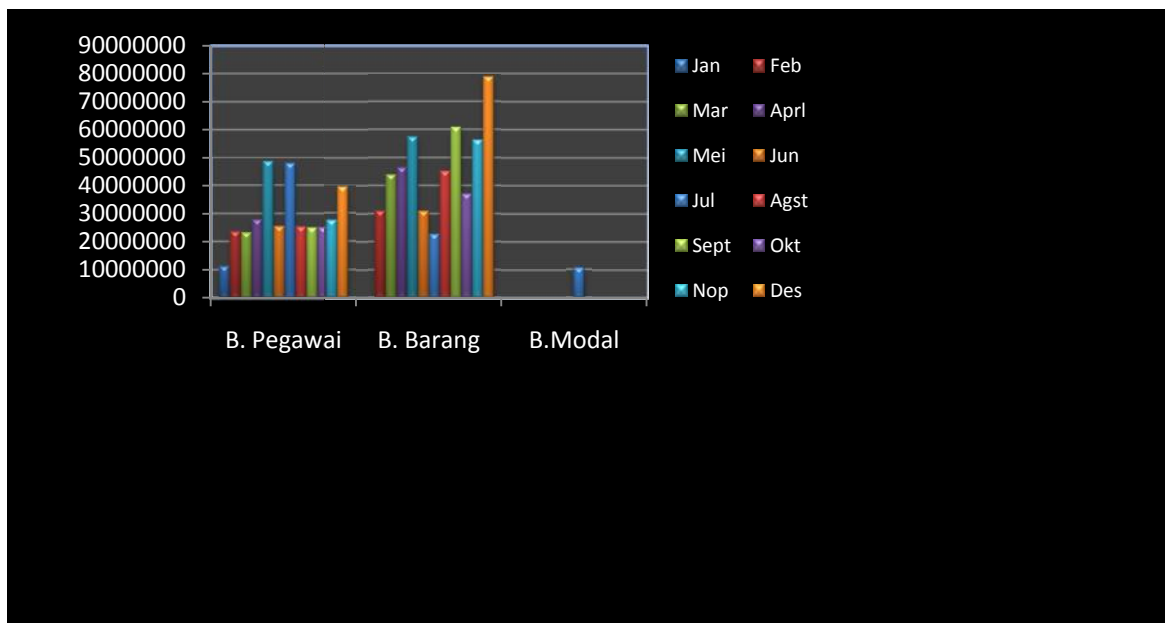
Pagu anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh tahun anggaran 2019 sesuai DIPA No. 059.03.2.653945/2019 tanggal 05 Desember 2018 adalah sebesar Rp.9.014.036.000,- yang terdiri dari 2 sumber anggaran yaitu : Rupiah Murni 4.857.002.000,- dan PNBPN sebesar Rp. 4.157.034.000,-

Dalam pelaksanaan anggaran, DIPA tahun 2019 mengalami revisi sebanyak 5 (lima) kali yaitu :

- Revisi ke-1 tanggal 19 September 2019 revisi pergeseran anggaran antar keluaran (output) dalam satu satker dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja operasional dan penambahan kegiatan untuk peningkatan sarana dan prasarana perkantoran.

- Revisi ke-2 tanggal 24 Oktober 2019 revisi antisipasi pagu minus belanja gaji dan tunjangan pegawai.
- Revisi ke-3 tanggal 29 Oktober 2019 revisi antisipasi pagu minus belanja gaji dan tunjangan pegawai (kesalahan sistem aplikasi dari pihak kanwil pada seluruh satker).
- Revisi ke-4 tanggal 31 Desember 2019 revisi pagu minus belanja gaji dan tunjangan pegawai, dan pergantian Kuasa Pengguna Anggaran serta antisipasi perubahan kondisi prioritas kebutuhan.
- Revisi ke-5 tanggal 16 Januari 2020 revisi pagu minus belanja gaji dan tunjangan pegawai, dan pergantian Kuasa Pengguna Anggaran serta antisipasi perubahan kondisi prioritas kebutuhan.

Eksekusi atau realisasi rencana penggunaan anggaran (*dishbursement plant*) tahun 2019 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik realisasi penyerapan anggaran tahun 2019

Berdasarkan grafik realisasi penyerapan anggaran di atas dapat diketahui penyerapan anggaran banyak terjadi di bulan Desember untuk Belanja Barang dikarenakan adanya percepatan dan optimalisasi penyerapan anggaran sesuai dengan target yang telah direncanakan, sementara pada Belanja Pegawai dan Belanja Barang pada setiap bulannya relatif stabil, sedangkan pada Belanja Modal hanya ada satu kegiatan terealisasi di Juli 2019.



Grafik perbandingan rencana penyerapan dengan realisasi penyerapan TA. 2019

Berdasarkan grafik perbandingan rencana penyerapan dengan realisasi penyerapan di atas dapat diketahui secara akumulasi penyerapan anggaran setiap bulannya lebih tinggi dari pada rencana penyerapan.

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa capaian untuk indikator “Layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan” telah terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan (100%), sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini tercapai.

B. KINERJA LAINNYA

1. Iklan Layanan Masyarakat (Publikasi) dan Sosialisasi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Kegiatan Iklan Layanan Masyarakat dan Sosialisasi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio merupakan kegiatan strategis dalam memberikan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat, terkait dengan regulasi bidang telekomunikasi maupun perizinan ISR/telekomunikasi berbasis online, hal ini sesuai dengan 3 (tiga) program prioritas dari Dirjen SDPPI yang salah satunya adalah *Brand Image/Brand Issue*.

Berdasarkan program kerja pada Balmon Kelas II Banda Aceh Tahun 2019, untuk kegiatan iklan layanan masyarakat (Publikasi) dari target 6 Kabupaten/Kota kegiatan telah tercapai 100% yang pelaksanaannya dilakukan dengan pola media Elektronik (ILM radio siaran), dan media luar

ruangan (Billboard), sedangkan untuk sosialisasi penggunaan spektrum frekuensi radio 1 kegiatan dan telah tercapai 100%.



2. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015

Berdasarkan program kerja pada Balmon SFR Kelas II Banda Aceh Tahun 2019, Sertifikasi ISO 9001:2015 merupakan salah satu wujud nyata dalam upaya peningkatan dalam kualitas layanan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dimana pada hasilnya yang telah didampingi oleh konsultan yang memiliki kualifikasi dibidangnya dengan hasil yang didapatkan Balmon SFR Kelas II Banda Aceh layak diberikan sertifikasi ISO 9001:2015 dari lembaga sertifikasi Nobel Certification.

C. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 s.d. 2019

No	Sasaran	Indikator	2018		2019	
			Target	Capaian	Target	Capaian
1	SASARAN 1. Layanan Monitoring, Pengukuran, Validasi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	1. Persentase Kabupaten/Kota yang dapat dimonitor	80%	86,96 %	80%	82,61 %
		2. Persentase (%) Stasiun Radio Penyiaran (Radio dan TV) yang terukur sesuai dengan data ISR	35%	88,3 %	35%	78,15 %
		3. Persentase (%) Jumlah aduan/klaim yang diselesaikan	94%	100 %	95%	100 %
		4. Persentase (%) Kepatuhan penggunaan frekuensi radio di wilayah kerja UPT	85%	94 %	80%	89,04 %
		Persentase (%) Kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR	81%	82%	85%	80,25%
		Persentase (%) Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT	83%	80%	85%	96,33%
		Persentase (%) Terdistribusinya SPP, ST, dan ISR oleh UPT	100%	100%	100%	100%
		Persentase (%) Terlaksananya UNAR	100%	100%	100%	100%
2	SASARAN 2. Terwujudnya Tata Kelola UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang bersih, efisien dan efektif	Persentase (%) Pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio	100%	100%	100%	100%
		Persentase (%) Layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	100%	100%	100%	100%

D. REALISASI ANGGARAN

Pagu Anggaran tahun 2019 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh semula berjumlah sebesar Rp. 8.849.270.000,- namun setelah revisi menjadi sebesar Rp. 9.014.036.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.710.083.534,- atau 96,63%.

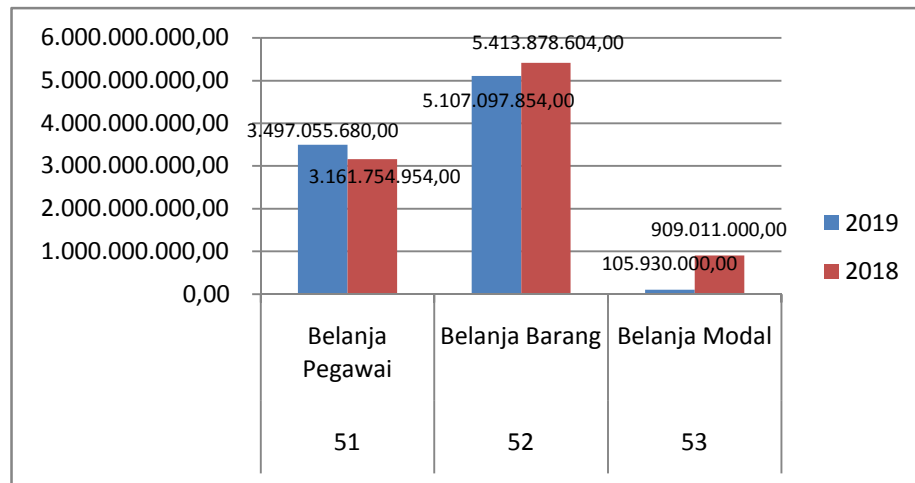
Rincian anggaran tersebut dirinci menurut sasarannya adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

SASARAN	PAGU	REALISASI	PROSENTASE
SASARAN 1. Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Penanganan Gangguan Frekuensi Radio	3.299.881.000	3.266.446.153	98,98 %
SASARAN 2. Terwujudnya Tata Kelola UPT Monspekfiredrad yang bersih, efisien dan efektif.	5.714.155.000	5.483.637.381	95,96 %
TOTAL	9.014.036.000	8.710.083.534	96,63 %

Laporan realisasi anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp8.710.083.534 atau 96,63 % dari pagu anggaran sebesar Rp9.014.036.000,- dengan rincian anggaran dan realisasi belanja sebagai berikut :

URAIAN	Periode 31 Desember 2019		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Pegawai	3.509.190.000	3.497.055.680	99,65
Belanja Barang	5.397.744.000	5.107.097.854	94,62
Belanja Modal	107.102.000	105.930.000	98,91
Total Belanja	9.014.036.000	8.710.083.534	96,63

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan kegiatan untuk tahun anggaran 2019 sampai dengan periode 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

OUTPUT	TAHUN ANGGARAN 2019		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban pemanfaatan sumberdaya pos dan Informatika Balmon Kelas II Banda Aceh	719.039.000	691.622.505	96,19
Layanan Penyelesaian Penanganan Gangguan Balmon Kelas II Banda Aceh	26.110.000	25.890.161	99,16
Dukungan layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penanganan gangguan frekuensi radio UPT Ditjen SDPPI	2.554.732.000	2.508.935.255	98,21
Layanan Internal (Overhead)	107.102.000	105.930.000	98,91
Layanan Perkantoran	5.607.053.000	5.377.707.381	95,91
Total	9.014.036.000	8.710.085.302	96,63

BAB IV

P E N U T U P

Tahun 2019 ini, sasaran-sasaran yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019 menjadi pedoman kerja dan menjadi prinsip dasar pelayanan prima yang harus diberikan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh. Program kerja tahun anggaran 2019 telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, namun masih perlu adanya peningkatan dimasa yang akan datang sehingga mempunyai perencanaan dan realisasi yang lebih baik lagi.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengemban tugas untuk mendukung pengelolaan salah satu sumber daya terbatas milik negara yaitu spektrum frekuensi radio. Misi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh adalah meningkatkan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio, meningkatkan pelayanan kepada pengguna spektrum frekuensi radio, meningkatkan kualitas pemahaman pengguna spektrum frekuensi radio terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, meminimalisir tingkat pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang spektrum frekuensi radio, serta meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional sehingga layak pakai dan sesuai perkembangan teknologi.

Berdasarkan penetapan kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh tahun 2019, telah ditetapkan 10 (sepuluh) indikator kinerja yang mendukung 2 (dua) sasaran program Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh. Dari hasil analisa dan pengukuran capaian kinerja di tahun 2019, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh berhasil mencapai beberapa indikator kinerja berdasarkan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya.

Beberapa indikator kinerja (IK) telah mampu menunjukkan kinerja sesuai harapan dengan target capaian 100%, yaitu indikator kinerja (IK) “Persentase (%) Kabupaten/Kota yang dapat dimonitor” capaian 82.61% (target 80%, realisasi 103.26%) “Persentase(%) stasiun radio penyiaran yang terukur sesuai ISR” capaian 78.15% (target 35%, realisasi 223,29%) “Persentase(%) jumlah aduan/klaim yang diselesaikan” capaian 100% (target 95%, realisasi 105.26%) “Persentase(%) kepatuhan penggunaan frekuensi radio diwilayah UPT” capaian 89,04% (target 80%, realisasi 111,3%) “Persentase(%) kesesuai data hasil inspeksi dengan data ISR” capaian 80,25% (target 85%, realisasi 94,41%) “Persentase(%) terdistribusinya SPP, ST dan ISR oleh UPT” capaian 100% (target 100%, realisasi 100%) “Persentase(%) terlaksananya UNAR” capaian 100% (target 100%, realisasi 100%) “Persentase(%) pelaksanaan pendampingan pengurusan penyelesaian piutang BHP frekuensi radio” capaian 100% (target 100%, realisasi 100%) “Persentase(%) layanan administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan ” capaian 100% (target 100%, realisasi 100%).

Bahkan indikator kinerja unggulan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh mampu mencapai target lebih dari 100% yaitu indikator kinerja (IK) “Persentase (%) stasiun radio penyiaran (radio dan TV) yang terukur sesuai ISR dengan realisasi persentase 223,29%.

Namun demikian ada indikator kinerja (IK) yang diakui tidak maksimal capaiannya yaitu “Persentase (%) kesesuaian data hasil inspeksi dengan data ISR dengan realisasi persentase 94.41%, dengan uraian kendala sudah dijelaskan dilembaran sebelumnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi penting untuk mengetahui peran dan menilai kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh. Pada LKIP ini sudah digunakan indikator kinerja kuantitatif dan analisis hasil capaian diuraikan secara deskriptif dan diharapkan dapat memudahkan pembaca untuk memberikan penilaian serta masukan terhadap kesempurnaan LKIP ini. Dengan demikian, laporan ini dapat menjadi alat untuk menginventarisasi keberhasilan dan permasalahan-permasalahan yang ada, dan dengan demikian dapat dimanfaatkan untuk proses perencanaan selanjutnya.



Balmon SFR Kelas II Banda Aceh
Jl. P. Nyak Makam No. 33, Banda Aceh-23117, Indonesia
Telp. 0651 – 34433
Fax. 0651-638538
Email : upt_aceh@postel.go.id

